



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SURABAYA

UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NANIK SUKRISTINA**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **902076**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	5.708.561.389
1. Tanah dan Bangunan Seluas 185 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 2.891.949.624		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/70 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 715.825.688		
3. Tanah Seluas 7.004 m2 di KAB / KOTA MALANG, Rp. 1.128.684.375		
4. Tanah Seluas 8.653 m2 di KAB / KOTA MALANG, Rp. 972.101.702		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	139.000.000
1. MOBIL, DFSK DSFK GLORY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000		
2. MOTOR, HONDA HONDA 150 RSE Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
3. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
4. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 1985, HADIAH Rp. 2.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	138.777.648
D. SURAT BERHARGA	Rp.	4.384.990.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	379.931.909
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.037.498.000
Sub Total	Rp.	11.788.758.946



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 11.788.758.946

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.